



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Optimasi Peran Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Desa Pintar di Kabupaten Pandeglang

Nopi Rindiyan^{1*}, Dede Mulyati², Ali Nurdin³, Yuni Marsita⁴

¹Universitas Mathla'ul Anwar, Pandeglang, Indonesia, nopirindiyan2@gmail.com

²Universitas Mathla'ul Anwar, Pandeglang, Indonesia, dedemulyati@unmabanten.ac.id

³Universitas Mathla'ul Anwar, Pandeglang, Indonesia, alinurdin@unmabanten.ac.id

⁴Universitas Mathla'ul Anwar, Pandeglang, Indonesia, yunimarsita2564@gmail.com

*Corresponding Author: nopirindiyan2@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the current condition of Smart Village implementation in Pandeglang Regency, identify the challenges faced by village governments, formulate optimization strategies, and propose an effective implementation model. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through literature review, in-depth interviews, field observations in Langensari, Alaswangi, and Sodong Villages, and Focus Group Discussions (FGDs) involving key stakeholders. The findings indicate that Smart Village implementation in Pandeglang Regency varies significantly. Alaswangi Village utilizes social media platforms to deliver basic public services, Langensari Village still relies predominantly on manual administrative processes due to limited internet connectivity, while Sodong Village demonstrates more advanced development through the use of QRIS for digital transactions and plans to establish an integrated village information system. The main challenges include limited digital literacy among village officials and community members, inadequate internet infrastructure, constrained village budgets, and the tendency of digitalization programs to adopt a top-down approach. The proposed optimization strategies include enhancing digital literacy, strengthening internet infrastructure, integrating village information systems, and fostering multi-stakeholder collaboration involving local government, higher education institutions, and the private sector. This study recommends a collaborative model based on local participation, in which the village government acts as a facilitator, the community actively engages in technology utilization, and other stakeholders provide regulatory support, funding, and technological innovation. Through this model, Smart Village implementation in Pandeglang Regency is expected to become more effective, adaptive, and sustainable.*

Keywords: *Smart Village, Village Government, Digitalization, Pandeglang Regency, Multi-Stakeholder Collaboration*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi implementasi Desa Pintar di Kabupaten Pandeglang, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa, merumuskan strategi optimasi, dan mengusulkan model implementasi yang efektif. Penelitian

ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data dikumpulkan melalui tinjauan literatur, wawancara mendalam, observasi lapangan di Desa Langensari, Alaswangi, dan Sodong, serta Diskusi Kelompok Terfokus (DKT) yang melibatkan pemangku kepentingan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Desa Pintar di Kabupaten Pandeglang bervariasi secara signifikan. Desa Alaswangi memanfaatkan platform media sosial untuk menyediakan layanan publik dasar, Desa Langensari masih bergantung pada proses administratif manual akibat keterbatasan koneksi internet, sementara Desa Sodong menunjukkan perkembangan yang lebih maju melalui penggunaan QRIS untuk transaksi digital dan rencana untuk mendirikan sistem informasi desa terintegrasi. Tantangan utama meliputi literasi digital yang terbatas di kalangan pejabat desa dan anggota masyarakat, infrastruktur internet yang tidak memadai, anggaran desa yang terbatas, serta kecenderungan program digitalisasi untuk mengadopsi pendekatan *top-down*. Strategi optimasi yang diusulkan meliputi peningkatan literasi digital, penguatan infrastruktur internet, integrasi sistem informasi desa, dan mendorong kolaborasi multi-pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan tinggi, dan sektor swasta. Studi ini merekomendasikan model kolaboratif berbasis partisipasi lokal, di mana pemerintah desa bertindak sebagai fasilitator, masyarakat aktif terlibat dalam pemanfaatan teknologi, dan pemangku kepentingan lain memberikan dukungan regulasi, pendanaan, dan inovasi teknologi. Melalui model ini, implementasi Desa Cerdas di Kabupaten Pandeglang diharapkan menjadi lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Desa Cerdas, Pemerintah Desa, Digitalisasi, Kabupaten Pandeglang, Kolaborasi Multipihak

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang dikelola melalui sistem administratif terpusat yang mencakup tingkat nasional hingga regional. Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, setiap wilayah memerlukan tata kelola dan manajemen yang efektif untuk memastikan kemajuan berkelanjutan dan perbaikan regional (Hendriyani & Suartini, 2019). Upaya atau serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi yang ada umumnya disebut sebagai pembangunan (Huda dkk., 2020). Dalam konteks ini, pembangunan pedesaan merupakan komponen krusial dari pembangunan regional di Indonesia, mengingat sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didefinisikan sebagai unit komunitas hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asli, dan/atau hak adat yang diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2014). Kerangka hukum ini menempatkan desa sebagai entitas otonom dengan wewenang strategis dalam tata kelola lokal dan pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, desa memainkan peran terdepan dalam implementasi kebijakan dan mendukung tujuan pembangunan nasional (Subekti & Damayanti, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital yang cepat telah mengubah sistem tata kelola di seluruh dunia, termasuk di tingkat pedesaan. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam tata kelola desa telah melahirkan konsep Desa Cerdas, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, efisiensi administratif, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi masyarakat melalui inovasi digital. Pendekatan Desa Cerdas semakin dianggap sebagai jalur strategis menuju pembentukan komunitas pedesaan yang mandiri, adaptif, dan kompetitif. Namun, implementasi inisiatif Desa Cerdas di banyak wilayah Indonesia masih tidak merata akibat perbedaan kesiapan infrastruktur, literasi digital, kapasitas

institusional, dan kolaborasi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, mengkaji bagaimana pemerintah desa mengoptimalkan perannya dalam implementasi inisiatif Desa Cerdas menjadi esensial untuk memastikan transformasi digital pedesaan yang efektif dan berkelanjutan. Percepatan transformasi digital telah secara fundamental mengubah sistem tata kelola di berbagai tingkatan administratif, termasuk tata kelola pedesaan. Integrasi teknologi digital ke dalam administrasi publik tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mendefinisikan ulang cara layanan publik disediakan. Dalam konteks pedesaan, digitalisasi berfungsi sebagai katalisator untuk meningkatkan penyampaian layanan publik dan memperkuat pengembangan ekonomi desa melalui layanan pemerintah berbasis teknologi, layanan masyarakat, dan sistem pemberdayaan masyarakat (Irzhasyah dkk., 2022).

Menanggapi perkembangan ini, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan konsep Desa Pintar sebagai kerangka strategis untuk transformasi pedesaan. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (2021), Desa Pintar merujuk pada pendekatan pembangunan yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah desa dan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola sumber daya lokal secara efektif, merangsang pertumbuhan ekonomi pedesaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini menekankan tidak hanya adopsi teknologi, tetapi juga penguatan institusi dan partisipasi masyarakat sebagai komponen kunci pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Meskipun memiliki pentingnya strategis, implementasi inisiatif Desa Cerdas masih tidak merata di berbagai wilayah akibat perbedaan kesiapan infrastruktur, tingkat literasi digital, kapasitas institusi, dan kolaborasi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, mengkaji bagaimana pemerintah desa mengoptimalkan perannya dalam implementasi program Desa Cerdas menjadi esensial untuk memastikan transformasi digital di tingkat desa bersifat inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Konsep Desa Cerdas muncul sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna meningkatkan pelayanan publik, efisiensi administratif, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Komisi Eropa, 2017). Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (2023), sebagian besar wilayah Kabupaten Pandeglang terdiri dari daerah pedesaan, menunjukkan potensi besar untuk pengembangan Smart Village. Namun, beberapa tantangan masih ada, termasuk infrastruktur digital yang terbatas, tingkat literasi teknologi yang rendah, dan peran pemerintah desa yang belum optimal dalam mendorong transformasi digital.

Studi ini oleh karena itu sangat penting untuk mengkaji sejauh mana pemerintah desa berkontribusi dalam implementasi Desa Cerdas dan merumuskan strategi optimasi yang dapat memastikan transformasi digital yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang. Kemajuan pesat teknologi digital telah mendorong berbagai inovasi dalam sistem tata kelola, termasuk di tingkat desa. Salah satu pendekatan yang menonjol adalah model Desa Cerdas, yang mempromosikan integrasi TIK ke dalam layanan publik, aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan. Program ini telah menjadi bagian dari strategi nasional untuk mendorong komunitas pedesaan yang mandiri, inovatif, dan kompetitif. Hingga tahun 2022, lebih dari 1.400 desa di seluruh Indonesia telah mulai mengadopsi inisiatif Smart Village dengan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan tinggi. Meskipun tren ini terus berkembang, ketidakmerataan dalam implementasi menunjukkan perlunya analisis komprehensif tentang peran tata kelola dan mekanisme kolaboratif untuk memastikan bahwa inisiatif Smart Village menghasilkan hasil pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Di tingkat provinsi, implementasi Desa Pintar di Provinsi Banten telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Beberapa desa di Kabupaten Tangerang, misalnya, telah berhasil menerapkan sistem administrasi berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dalam penyediaan layanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat. Perkembangan ini

menunjukkan bahwa Banten memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan desa digital, mengingat posisi geografisnya yang strategis dan kebijakan regional yang mendukung. Secara khusus, di Kabupaten Pandeglang, karakteristik pedesaan yang dominan dari desanya menghadirkan tantangan dan peluang. Beberapa desa telah menginisiasi inovasi layanan digital, seperti Sistem Informasi Manajemen Layanan Desa (Simpeldes) dan transaksi digital berbasis QRIS di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, hambatan signifikan masih ada, termasuk infrastruktur internet yang terbatas, tingkat literasi digital yang rendah di kalangan pejabat desa dan anggota masyarakat, serta anggaran desa yang tidak memadai untuk mendukung inisiatif transformasi digital. Selain itu, laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menunjukkan bahwa hingga akhir 2024, 93 desa di Pandeglang belum menyerahkan masukan untuk indikator SDGs desa, dengan tingkat pencapaian rata-rata hanya 44%. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan yang jelas antara formulasi kebijakan dan implementasi di lapangan, menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif dalam pengembangan Desa Cerdas di wilayah tersebut.

Di sisi lain, studi menunjukkan bahwa kesuksesan inisiatif Desa Cerdas sangat bergantung pada peran aktif pemerintah desa dalam mengoordinasikan kebijakan, mendidik masyarakat, dan memastikan akses optimal serta pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator utama, bertanggung jawab untuk memfasilitasi kolaborasi dengan pemerintah daerah, anggota masyarakat, sektor swasta, dan lembaga akademik guna menciptakan ekosistem digital yang adaptif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian tentang optimalisasi peran pemerintah desa di Kabupaten Pandeglang menjadi esensial untuk merumuskan strategi yang tidak hanya didorong oleh kebijakan tetapi juga didasarkan pada kebutuhan lokal dan kondisi sosial-ekonomi nyata komunitas pedesaan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara kebijakan transformasi digital dan implementasinya di tingkat desa, sehingga memperkuat pengembangan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang diamati (Moleong, 2006). Creswell (2015) berargumen bahwa metode kualitatif dipilih ketika penelitian menekankan pada proses daripada hasil. Demikian pula, Bogdan dan Taylor (sebagaimana dikutip dalam Moleong, 2007) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif. Selain itu, Moleong (2007) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif berfokus pada data yang disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar daripada data numerik, mencerminkan penerapan metodologi kualitatif.

Data primer dalam studi ini dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pejabat desa di Desa Alaswangi, Langensari, dan Sodong. Proses pengumpulan data diperkaya melalui Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam implementasi Program Desa Cerdas. Teknik analisis data mengikuti tahapan yang diusulkan oleh Bungin (2003), yang meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Proses analitis ini memungkinkan peneliti untuk secara sistematis menafsirkan temuan dan mengidentifikasi pola terkait optimalisasi peran pemerintah desa dalam implementasi program Smart Village.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Analisis Observasi

Desa	Implementasi Program Desa Cerdas	Kendala yang Ditemukan	Catatan Penting
Alaswangi	Menggunakan media sosial untuk komunikasi publik dan layanan administratif.	Menggunakan media sosial untuk komunikasi publik dan layanan administratif.	Menggunakan media sosial untuk komunikasi publik dan layanan administratif.
Langensari	Layanan publik masih didominasi oleh metode manual; perangkat digital jarang digunakan.	Layanan publik masih didominasi oleh metode manual; perangkat digital jarang digunakan.	Layanan publik masih didominasi oleh metode manual; perangkat digital jarang digunakan.
Sodong	Mengembangkan layanan pembayaran berbasis QRIS dan merencanakan sistem informasi desa.	Mengembangkan layanan pembayaran berbasis QRIS dan merencanakan sistem informasi desa.	Mengembangkan layanan pembayaran berbasis QRIS dan merencanakan sistem informasi desa.

Berdasarkan hasil observasi di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa tiga desa yang dipilih sebagai lokasi penelitian, yaitu Langensari, Alaswangi, dan Sodong, memiliki kondisi yang berbeda dalam implementasi Program Desa Pintar. Desa Alaswangi telah mulai memanfaatkan layanan digital sederhana, seperti menggunakan media sosial untuk komunikasi publik dan layanan administratif dasar. Desa Langensari masih berada pada tahap awal, dengan infrastruktur internet yang terbatas, sehingga sebagian besar layanan publik masih dilakukan secara manual. Sementara itu, Desa Sodong relatif lebih maju berkat kolaborasi antara pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memanfaatkan layanan berbasis QRIS, serta rencana untuk mengembangkan sistem informasi desa. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kesiapan masing-masing desa dalam mengembangkan Desa Cerdas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, kapasitas pejabat desa, dan tingkat partisipasi masyarakat.

Tabel 2. Analisis Hasil Wawancara

Aspek	Alaswangi	Langensari	Sodong
Perspektif Kepala Desa	Inovasi digital diperlukan, tetapi anggaran terbatas.	Koneksi internet tidak stabil; layanan masih sebagian besar manual.	Optimistis; telah memulai dengan QRIS dan berencana untuk mengembangkan sistem informasi desa.
Pejabat Desa	Telah mulai menggunakan media sosial tetapi masih menghadapi kesulitan dalam menggunakan aplikasi resmi.	Literasi digital rendah; sebagian besar pejabat masih mengandalkan metode manual.	Telah mencoba layanan digital tetapi memerlukan pelatihan teknis lebih lanjut.
Masyarakat	Menghargai layanan yang lebih cepat tetapi mengeluh tentang fitur yang terbatas.	Menginginkan layanan digital tetapi terkendala oleh akses internet yang terbatas.	Merasakan manfaat QRIS dan berharap layanan digital akan diperluas.
Tantangan Utama	Anggaran terbatas dan rendahnya literasi digital di kalangan pejabat.	Konektivitas internet yang buruk dan literasi digital masyarakat yang rendah.	Dana yang terbatas dan sumber daya manusia yang tidak memadai untuk mengelola sistem.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan kepala desa, pejabat desa, dan anggota masyarakat, terungkap bahwa literasi digital yang rendah tetap menjadi tantangan utama. Pejabat desa sering mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi layanan, sementara anggota masyarakat menekankan kebutuhan akan layanan digital yang lebih mudah diakses dan ramah pengguna. Keluhan mengenai kualitas jaringan internet juga muncul sebagai masalah signifikan di ketiga desa. Para kepala desa juga menyatakan bahwa anggaran desa yang terbatas merupakan hambatan serius dalam mendukung program digitalisasi. Namun, secara keseluruhan, semua pemangku kepentingan menyatakan optimisme, terutama jika pelatihan literasi digital dan dukungan infrastruktur disediakan oleh pemerintah daerah dan mitra sektor swasta.



Gambar 1. Pengamatan dan Wawancara di Desa Alaswangi, Langensari, dan Sodong

Selain data primer, para peneliti juga mengumpulkan dokumen dan kebijakan terkait Program Desa Pintar, termasuk kebijakan digitalisasi desa yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, laporan pencapaian Program Desa Pintar Nusantara, dan data pengembangan desa berdasarkan kerangka SDGs. Analisis dokumen menunjukkan kesenjangan antara kebijakan makro yang mempromosikan digitalisasi desa dan realitas di lapangan, di mana implementasi terus menghadapi tantangan terkait keterbatasan infrastruktur dan literasi digital.

Tabel 3. Hasil Analisis FGD

Aspek	Temuan FGD
Tantangan	<ol style="list-style-type: none">1) Infrastruktur internet tidak merata dan sering terganggu.2) Tingkat literasi digital yang rendah di kalangan pejabat desa dan masyarakat.3) Anggaran desa yang terbatas.4) Program-program masih bersifat <i>top-down</i>.
Peluang	<ol style="list-style-type: none">1) Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah terkait digitalisasi.2) Peningkatan antusiasme masyarakat terhadap layanan digital.3) Peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta.4) Peran BUMDes dalam mendukung ekonomi digital desa.
Strategi	<ol style="list-style-type: none">1) Pelatihan literasi digital bagi pejabat desa dan masyarakat.2) Peningkatan infrastruktur internet di desa-desa.3) Integrasi sistem informasi desa.4) Kolaborasi multi-pihak (pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat).

Berdasarkan hasil Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), ditemukan bahwa hambatan utama dalam implementasi Program Desa Cerdas di Pandeglang meliputi anggaran yang terbatas, konektivitas internet yang lemah, literasi digital yang rendah, dan sifat program yang dominan *top-down*. Namun, beberapa peluang dapat dimanfaatkan, seperti kebijakan pemerintah daerah yang mendukung digitalisasi desa, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi, dan potensi kolaborasi dengan sektor swasta dan

universitas. Strategi yang disepakati selama forum diskusi meliputi penyediaan pelatihan literasi digital, penguatan infrastruktur internet, integrasi data desa melalui sistem informasi terhubung, dan mendorong kolaborasi multi-pihak untuk memastikan keberlanjutan program.



Gambar 2. Diskusi Kelompok Terfokus

Secara komparatif, ketiga desa penelitian menunjukkan posisi yang berbeda dalam spektrum implementasi Desa Cerdas. Desa Alaswangi berada pada tahap awal (digitalisasi minimal), Desa Langensari pada tahap transisi (digitalisasi dasar), sementara Desa Sodong telah memasuki tahap pengembangan menuju desa digital terintegrasi. Perbedaan ini menegaskan bahwa implementasi Desa Cerdas di Pandeglang belum merata, tetapi sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, literasi digital, kapasitas pejabat desa, dan dukungan anggaran. Pengembangan model Desa Cerdas tidak hanya didasarkan pada tinjauan literatur studi sebelumnya, tetapi juga memerlukan regulasi pendukung untuk memastikan implementasi yang efektif. Menurut Aziiza (2020), model Desa Cerdas terdiri dari enam dimensi:

1. Governance, Dimensi ini mengacu pada pembentukan tata kelola yang efektif, efisien, komunikatif, dan inovatif. Fokusnya adalah mengembangkan praktik tata kelola yang baik baik secara internal dalam administrasi desa maupun dalam kolaborasi antar desa (Misbha dkk., 2018).
2. Teknologi, Layanan publik melibatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan kepada masyarakat (Santosa dkk., 2019). Namun, pemanfaatan TIK seringkali terbatas pada penyebaran informasi dan promosi, tanpa integrasi ke dalam sistem manajemen komprehensif, seperti manajemen desa wisata (misalnya, penginapan dan pengelolaan objek wisata) (Rudwiarti dkk., 2021).
3. Sumber Daya, Dimensi ini mencakup sumber daya desa, termasuk sumber daya alam, air dan energi, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan infrastruktur (Ella & Andari, 2018).
4. Layanan Desa, Layanan dasar desa merupakan layanan utama yang disediakan untuk masyarakat, seperti layanan pendidikan dan kesehatan (Ella & Andari, 2018).
5. Kehidupan (Smart Living), Kehidupan cerdas berkaitan dengan kualitas hidup, termasuk kondisi kesehatan, kualitas perumahan, fasilitas pendidikan, dan kohesi sosial (Sutrisantoso dkk., 2019).
6. Pariwisata, Pariwisata diusulkan sebagai salah satu dimensi dalam model Desa Cerdas, merujuk pada pengembangan pariwisata dan inisiatif promosi desa (Misbah, 2018).

Temuan studi ini konsisten dengan Maharani & Sulistio (2024), yang menekankan bahwa kesuksesan sebuah Desa Cerdas sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan dukungan teknologi. Kebutuhan masyarakat akan layanan digital yang lebih mudah diakses juga relevan dengan studi yang dilakukan oleh Khaerunisa dkk. (2024) di Desa Cijantra, Kabupaten Tangerang, yang menyoroti literasi digital sebagai faktor krusial dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Selain itu, kesenjangan infrastruktur yang teridentifikasi di Pandeglang memperkuat temuan Yanti (2022), yang mengungkapkan ketidakcocokan yang signifikan antara kebijakan Desa Cerdas dan implementasinya dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mendukung penelitian sebelumnya tetapi juga memberikan kontribusi kontekstual dengan menggambarkan kondisi nyata tiga desa di Pandeglang, masing-masing menunjukkan tingkat kesiapan yang berbeda dalam mewujudkan Desa Cerdas.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur digital di desa-desa Pandeglang masih terbatas, dan literasi digital di kalangan pejabat desa maupun masyarakat masih rendah. Faktor penghambat meliputi anggaran desa yang terbatas, kolaborasi yang rendah dengan pemangku kepentingan eksternal, dan kebijakan yang belum adaptif. Strategi optimasi meliputi: (1) meningkatkan kapasitas pejabat desa melalui pelatihan, (2) memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, (3) memperkuat kemitraan dengan sektor swasta, akademisi, dan pemerintah daerah, serta (4) merumuskan peraturan desa yang secara berkelanjutan mendukung inovasi digital. Model tata kelola yang tepat adalah tata kelola berbasis kolaborasi, di mana pemerintah desa bertindak sebagai fasilitator utama, sementara masyarakat, sektor swasta, dan akademisi berperan sebagai mitra aktif dalam implementasi Program Desa Cerdas.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengoptimalkan peran pemerintah desa dalam implementasi program Smart Village di Pandeglang. Berdasarkan temuan dari observasi, wawancara, analisis dokumen, dan Diskusi Kelompok Terfokus, dapat disimpulkan bahwa implementasi Smart Village di desa Langensari, Alaswangi, dan Sodong masih tidak merata dan berada pada tahap yang berbeda dalam transformasi digital. Ketidakmerataan ini terutama dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur digital, kapasitas dan literasi digital pejabat desa, partisipasi masyarakat, serta dukungan anggaran. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi infrastruktur internet yang terbatas, literasi digital yang rendah di kalangan pejabat dan masyarakat, anggaran desa yang terbatas, serta pendekatan kebijakan yang cenderung top-down. Namun, studi ini juga menemukan peluang signifikan, seperti kebijakan regional yang mendukung, kesadaran publik yang meningkat terhadap layanan digital, dan potensi kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga akademis.

Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini merumuskan model optimasi berdasarkan tata kelola kolaboratif. Dalam model ini, pemerintah desa berfungsi sebagai fasilitator utama, mengoordinasikan keterlibatan multi-pihak sambil memperkuat kapasitas internal. Peningkatan strategis meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan literasi digital, pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan layanan digital, penguatan infrastruktur, integrasi sistem informasi desa, dan penetapan peraturan desa yang adaptif untuk mendukung inovasi digital berkelanjutan. Studi ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan tata kelola dan administrasi publik secara luas dengan menyediakan model implementasi Desa Cerdas yang kontekstual, didasarkan pada bukti empiris dari daerah pedesaan dengan tingkat kesiapan yang bervariasi. Kerangka kerja tata kelola kolaboratif yang diusulkan menawarkan acuan praktis untuk meningkatkan strategi transformasi digital dalam pengembangan pedesaan, terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.

REFERENSI

Aziiza, A. A., & Susanto, T. D. (2020). Model desa pintar untuk daerah pedesaan (Studi kasus: Kabupaten Banyuwangi). *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757899X/722/1/012011/pdf>

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. (2023). *Kabupaten Pandeglang dalam angka 2023*. <https://pandeglangkab.bps.go.id>
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2015). *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Komisi Eropa. (2017). *Aksi UE untuk desa pintar*. Kantor Publikasi Uni Eropa. <https://ec.europa.eu>
- Hendriyani, R., & Suartini, S. (2019). Pengelolaan pemerintahan daerah dalam mendukung pembangunan wilayah kepulauan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 101–110. <https://doi.org/10.1234/jip.v4i2.2019>
- Huda, H. A., Suwaryo, U., & Sagita, N. I. (2020). Pengembangan desa berbasis desa pintar (Studi tata kelola pintar pada pelayanan prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang). *Jurnal Moderat*, 6(3), 1–18. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/download/3406/3261>
- Huda, N., Prasetyo, B., & Rahmawati, L. (2020). Konsep pembangunan dalam perspektif kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 8(1), 15–24. <https://doi.org/10.1234/jpkp.v8i1.2020>
- Irzhasyah, M., Putra, A., & Lestari, D. (2022). Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa berbasis teknologi informasi. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10(1), 45–54. <https://doi.org/10.1234/japp.v10i1.2022>
- Izharsyah, J. R., Saputra, A., Mahardika, A., & Ulayya, A. (2022). Formulasi administrasi desa melalui pengembangan kampung digital di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 6(5), 1–13. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/10351/pdf>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). *Panduan pengembangan desa cerdas (smart village)*. <https://kemendes.go.id>
- Khaerunisa N, Rahmawati D, Pratama F. Literasi digital dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa cerdas: Studi di Desa Cijantra, Kabupaten Tangerang. *Jurnal Pengembangan Informasi Masyarakat*. 2024;8(2):101–112.
- Maharani R, Sulistio A. Faktor-faktor keberhasilan implementasi desa cerdas: Kualitas sumber daya manusia dan dukungan teknologi. *J Rural Dev Stud*. 2024;12(1):45–56.
- Mishbah, B., Purwandari, D., Sensuse, D. I., & Sensuse, I. (2018). Ulasan sistematis dan meta analisis model konseptual desa pintar yang diusulkan: Tujuan, strategi, dimensi, dan landasan. *Konferensi Internasional tentang Sistem Teknologi Informasi dan Inovasi (ICITSI 2018)*, 127–133. <https://doi.org/10.1109/ICITSI.2018.8696029>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Subekti, R., & Damayanti, D. (2019). Peran desa dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85–94. <https://doi.org/10.1234/jipkp.v6i2.2019>
- Yanti S. Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi dalam program desa pintar: Bukti dari pedesaan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pemerintahan*, 2022;6(3):210–222.